

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Gradila Apriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: gradilaapriani@gmail.com

ABSTRAK: Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak permasalahan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional persampahan, meliputi tahap pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir, dan pemanfaatan sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dalam pengelolaan sampah ditinjau dari komunikasi serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Sampah.

Sampah menjadi suatu problema yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan maupun pedesaan ketika sampah tidak terorganisir dengan baik. Dalam pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di jelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat 1 bahwa sampah terdiri atas (a) sampah rumah tangga (b) sampah sejenis rumah tangga (c) dan sampah spesifik. Serta dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang mendefinisikan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam upaya pemerintah, pengelolaan persampahan diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) pada pasal dua menyatakan KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Seperti yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kebijakan tersebut mengintruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola persampahaan yang memungkinkan terorganisirnya dengan baik melalui pencapaian pelaksanaan program menjadi ramah lingkungan. Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara maupun polusi air. Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang bagi nyamuk berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit kemasyarakat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979:18), menjelaskan makna Implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (wahab, 1997 : 64-65).

Menurut Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Komunikasi Menurut Onong U. effendi (2008:5) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Rogers dan Kincaid (fajar, 2009:31) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama yang lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Adapun tujuan dari komunikasi adalah membangun atau menciptakan pemahaman atau pengertian bersama. Saling memahami dan mengerti bukan berarti harus menyetujui tapi

mungkin dengan komunikasi terjadi suatu perubahan sikap, pendapat, perilaku atau perubahan secara sosial

Menurut Fajar (2009:39) tujuan dari komunikasi itu sendiri diantaranya adalah: mengubah sikap (*to change the attitude*), mengubah opini atau pendapat atau pandangan (*to change the opinion*), mengubah perilaku (*to change the behavior*), mengubah masyarakat (*to change the society*). Dalam Komunikasi efektif, agar pesan yang disampaikan komunikator dapat menghasilkan *feedback*.

Menurut pendapat Monroe (T. Suprpto : (1994:42) tersebut, jika kita ingin mempengaruhi orang lain, maka terlebih dahulu merebut perhatiannya, kemudian membangkitkan kebutuhannya, berikan petunjuk pada orang tersebut bagaimana cara memuaskan kebutuhan tersebut, kemudian berikan gambaran dalam pikirannya mengenai keuntungan dan kerugian yang akan ia peroleh apabila menerapkan atau tidak menerapkan gagasan kita, pada akhirnya berilah dorongan kepadanya agar ia mau mengambil tindakan

Pesan harus mudah dipahami oleh komunikan. Dalam menyampaikan pesan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor semantis, yakni menyangkut penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Agar komunikasi berjalan lancar, maka gangguan semantic ini harus diperhatikan oleh komunikator, sebab jika terjadi kesalahan ucap atau kesalahan tulis, maka akan menimbulkan salah pengertian (*mis-understanding*), atau salah tafsir (*mis-interpretation*), yang pada gilirannya dapat menimbulkan salah komunikasi (*mis-communication*).

Menurut Harold Lasswell dalam Effendy (2011:10) untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect?* Jika diuraikan, komunikasi meliputi jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut,

yaitu komunikator (*communicator, source, sender*), pesan (*message*), media (*channel, media*), komunikan (*communicant, communicate, receiver, recipient*), dan efek (*effect, impact, influence*). Menurut Wursanto (2001:31), komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan/penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) kepada pihak (seseorang atau tempat) lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. Berlo (dalam Erliana Hasan (2005:18) mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut dimana makna yang diperolehnya tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sarana dan prasarana perkantoran. Prasarana kantor adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman, patokan ataupun standar bagi orang-orang dalam bekerja di kantor tersebut. Prasarana kantor ini akan membimbing orang-orang bekerja sesuai aturan yang berlaku. Contoh: SOP, Buku Manual, peraturan. Sarana adalah segala alat yang dibutuhkan untuk menunjang dalam tercapainya tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala alat yang dibutuhkan untuk menunjang secara tidak langsung dalam mencapai tujuan. antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, contohnya mesin-mesin kantor, peralatan, perlengkapan kantor, perabot kantor dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Seperti contohnya; gedung, tanah, dan ruang.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagai mana mestinya. Infrastruktur menunjuk pada system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Grigg, 1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2014:6) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Dalam penelitian diskriptif ini, sifatnya menggali, menyusuri, menentukan fakta-fakta, masalah atau kendala yang mungkin dihadapi sekaligus memberikan penjelasan. Sedangkan metode kualitatif sendiri adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, dengan menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara memaparkan, menafsirkan, menganalisa, serta menginterpretasikan data yang ada”. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Perkuburan Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Seksi Kebersihan Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Dan masyarakat di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kota nanga pinoh beralamatkan di

Desa Tanjung Tengang yang berada dipinggiran Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan jarak tempuh sekitar + 5,0 Km dari pusat kota kelokasi (TPA). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Nanga Pinoh memiliki lahan seluas 10.22 Ha menggunakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan cara sampah di timbun dan dipadatkan, kemudian di tutup dengan tanah sebagai lapisan penutup .

Adapun sampah-sampah yang masuk ke TPA Kota Nanga Pinoh dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Nanga Pinoh Tahun 2020

No.	Jenis Sampah	Persentase %
1.	Organik	87,44%
2.	Plastik	12,56% Terdiri dari: 1. Residu (8,41%) 2. Barang Lapak/ Bernilai jual (4,15%)
3.	Karet	
4.	Logam	
5.	Kayu	
6.	Kertas	
7.	Lain-lain	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Persentasi untuk jenis sampah organik 87,44 % dengan jumlah penduduk sebanyak 37.240 Jiwa dengan produksi sampah rata-rata 32.67 (liter/hari) sedangkan untuk persentasi jenis sampah yang lain belum ada kajian untuk menentukan persentasi jenis sampah.

Proses pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) diawali dari pengangkutan sampah dari sumber sampah tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA), Setelah melewati jembatan timbang, sampah diletakkan di area penerimaan sampah, selanjutnya dilakukan pemilahan sampah tahap pertama di tempat pemilahan dengan *belt conveyor* antara sampah kering dan residunya yang berupa sampah plastik, kertas, kaleng/besi/aluminium, botol/kaca, kain dan karet/kulit. Sedangkan untuk sisa pemilahan

yang berupa sampah basah langsung ditampung pada lahan penampungan sebagai bahan kompos. Kemudian dilakukan pengemasan untuk barang lapak dan pengomposan untuk sampah basah. Untuk sampah plastik yang terpilah akan dilakukan pemilahan tahap kedua, dimana akan dipisahkan berdasarkan jenis plastiknya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjelaskan bahwa dalam konteks komunikasi lingkungan, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dilihat sebagai salah satu tahap dalam advokasi lingkungan bukan hanya mencakup pada media komunikasi, strategi komunikasi yang di gunakan serta audiens yang menjadi target namun juga termasuk edukasi khalayak, kampanye isu lingkungan, komunitas lingkungan serta aksi langsung oleh pelaksana kampanye. Komunikasi lingkungan yang

dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam program pengelolaan sampah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan solusi, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lebih lanjut dikatakan bahwa media yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat contohnya pembuatan spanduk, sosialisasi, dan juga di media sosial yang berkaitan tentang lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan oleh narasumber bahwa komunikasi lingkungan adalah aplikasi dari pendekatan-pendekatan, prinsip-prinsip, strategi, dan teknik-teknik komunikasi dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan. Hal ini bisa dimaknai sebagai pertukaran informasi, pengetahuan dan kearifan antar manusia dengan lingkungan, komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok

masyarakat, mereka dianggap sebagai sumber yang mengusahakan solusi pada masalah-masalah lingkungan dan mengupayakan pelestarian lingkungan.

Komunikasi menggunakan strategi komunikasi persuasif untuk mengubah sikap atau perilaku masyarakat yang dimaksud bahwa sebagian kecil masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan, peran Dinas Lingkungan Hidup, kepala desa dan ketua Rt/Rw disini sangat diperlukan untuk memberitahu dan mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan karena dalam menjaga kebersihan tugas semua orang atau masyarakat. Untuk mengetahui tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dalam komposisi pekerjaan harian lepas (PHL) kebersihan sesuai dengan topoksinya masing-masing.

Tabel 2. Pekerja Harian Lepas (PHL) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Tupoksi	Jumlah
1.	Bagian Angkut Sampah	43 orang
2.	Bagian TPA	20 orang
3.	Bagian Penyapuan	8 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Tahun 2021

Berdasarkan Tabel. 2 diketahui bahwa Komposisi Pekerjaan Harian Lepas (PHL) Kebersihan Bagian Angkut Sampah berjumlah 43 orang sesuai topoksi di Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas mengangkut sampah dari TPS ke mobil sampah, membersihkan sampah di sekitar TPS, melakukan pengecekan, merawat dan menjaga keamanan alat kerja yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan melaksanakan tugas lain dari atasan. Bagian TPA berjumlah 20 orang sesuai topoksi di Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap kendaraan dump dan armroll yang keluar masuk lokasi TPA, merawat dan membersihkan lingkungan di TPA serta melaksanakan tugas lain dari atasan. Sedangkan Bagian Penyapuan berjumlah 8 orang sesuai topoksi di Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas membersihkan

sampah/pasir dibadan jalan dan bahu jalan, mengumpulkan hasil sampah dan dimasukkan ke TPS sekitar.

Pengelolaan sampah di Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi memerlukan pembiayaan yang dibutuhkan untuk penambahan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah, tapi sekarang ini untuk memperoleh pembiayaan tersebut membutuhkan waktu, karena biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Padahal dalam pengelolaan sampah membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kebersihan kota dan tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Untuk melaksanakan program kerja dalam pengelolaan sampah perlu adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukung program kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam pengelolaan sampah.

Didalam sistem pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang pastinya memerlukan fasilitas atau transportasi dalam proses pengurangan di tempat penanganan, penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Salah satu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan adanya upaya tersebut untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah dikota Nanga Pinoh belum efektif disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah, sering terjadi keterlambatan

pengangkutan dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju (TPA) menyebabkan tertumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) dan masih ada sampah yang berserakan disudut-sudut kota, sungai dan lahan kosong masih menjadi pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA) juga belum secara maksimal dikelola dan ditata dengan rapi. Selain masalah tersebut ternyata masih ada beberapa permasalahan yang ditemui yaitu kurangnya sarana dan prasarana berupa tempat sampah di tepi jalan raya, pasar, dan ditempat lingkungan masyarakat yang seharusnya ada tempat sampah, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan jarak penempatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) antara perumahan warga terlalu jauh sehingga masyarakat membuang sampah disungai dan drainase terdekat.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Pada Tahun 2020

No	Angkutan TPA	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kontainer Sampah	10	8	2	
2.	Dump Truck	7	3	1	3
3.	Arm roll Truck	3	1	2	
4.	Gerobak Sampah	2	1		1
5.	Excavator	1	1		

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 diketahui jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup yaitu: Kontainer Sampah jumlah keseluruhan 10 buah yang masih dalam kondisi baik berjumlah 8 buah sedangkan 2 buah mengalami rusak ringan, dump truck jumlah keseluruhan 7 buah diantaranya 3 buah dalam keadaan baik, 1 buah mengalami rusak ringan sedangkan 1 buahnya mengalami rusak berat, Arm roll Truck jumlah keseluruhan 3 buah, 1 buah dalam keadaan baik, 2 buah mengalami rusak ringan, Gerobak Sampah jumlah keseluruhan 2 buah, 1 buah dalam keadaan baik sedangkan 1 buahnya lagi dalam keadaan rusak berat, alat

berat dalam pengelolaan sampah seperti Excavator berjumlah 1 buah dalam keadaan baik.

Analisis peneliti bahwa indikator yang menyebabkan terhambatnya program pengelolaan sampah Kota Nanga Pinoh adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta jarak penempatan pembuangan sampah sementara (TPS) dengan lingkungan warga yang terbilang jauh sehingga menjadi salah satu alasan masyarakat membuang sampah sembarangan, serta ketergantungan masyarakat kepada sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup yang dibuat di sekitar perumahan yang jumlah menampung sampah yang bisa dikatakan kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dilihat sebagai salah satu cara yang menggunakan tahap dalam advokasi lingkungan bukan hanya mencangkup pada media komunikasi, strategi komunikasi yang di gunakan serta audiens yang menjadi target namun juga termasuk edukasi khalayak, kampanye isu lingkungan, komunitas lingkungan serta aksi langsung oleh pelaksana kampanye. Hal ini bisa dimaknai sebagai pertukaran informasi, pengetahuan dan kearifan antar manusia dengan lingkungan, komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi mereka dianggap sebagai sumber yang mengusahakan solusi pada masalah-masalah lingkungan dan mengupayakan pelestarian lingkungan. Sehingga dapat mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan sampah pastinya membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kebersihan kota dan tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Untuk melaksanakan program kerja dalam pengelolaan sampah perlu adanya fasilita-fasilitas yang memadai untuk mendukung program kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam pengelolaan sampah. Salah satu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan adanya upaya tersebut untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sebaiknya untuk meningkatkan keberhasilan dalam program pengelolaan sampah dan program kerja lainnya yang berkaitan dengan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sebaiknya membuat pertemuan atau forum yang diadakan secara rutin dalam pengelolaan sampah sehingga dengan adanya forum tersebut diharapkan dengan adanya sharing/tukar pikiran mengenai pengelolaan sampah di setiap daerah yang dilayani dan mengetahui isu serta

permasalahan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Nanga Pinoh. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup perlu adanya penampahan peralatan atau armada pengangkut sampah terkhususnya untuk pengangkutan sampah di kompleks perumahan dan pembuatan atau penempatan pembuangan sampah yang berjarak tidak terlalu jauh dari pemukiman serta memperbesar ukuran tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab , Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agostiono. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Model Van Meter dan Van Horn.
- Bustomi y, ramdhani.M.A, dan Cahyana R. 2012. *Rancangan Bangun Sistem Informasi Di Kota Garut*.
- Christiyanto, F, Nurfitriyah, dan Sutadji. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015*.
- Amri Marzali, Antropologi. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisi kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ali Imron. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chaniago, H. 2013. *Manajemen Kantor Kontemporer*. Bandung: Aksara Limas Perkasa
- Priansa, D,J Dan Granida, A. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, efisien, dan Profesional*. Bandung : Alfabet.
- Marwansyah. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Nopemberi, A. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Ke Beradaan S'g'va Ge (Studi Kasus: Jalan Tjilik Riwut Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)
- Rumono, H.,N., Naryoso,A.N., Setyabudi, D., & Pradekso, T. (2014). *Hubungan Intensitas komunikasi Orangtua–anak dan Kelompok Referensi dengan minat memilih jurusan ilmu komunikasi pada siswa kelas XII*. *Interaksi Online*,2(2).
- Suprpto, T., 1994. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Perkembangannya*. MMTC Press Yogyakarta
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Wursanto Ig (2001). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Yogyakarta. Kanisius
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.2012. *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. No.18 Tahun 2012
- Peraturan Daerah. 2017. *Tentang Pengelolaan Sampah*. No.13 Tahun 2017.